

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN
BIOLOGIS SUAMI OLEH ISTRI PERTAMA (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN
NO.1284/PDT.G/2015/PA.PAS)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MOCHAMAD ROMADHONI ANSHORI

C100120209

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI OLEH
ISTRI PERTAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PASURUAN NO.1284/PDT.G/2015/PA.PAS)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MOCHAMAD ROMADHONI ANSHORI

C100120209

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rizka S. Ag.', written in a cursive style.

Dr. Rizka S. Ag., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI OLEH
ISTRI PERTAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PASURUAN NO.1284/PDT.G/2015/PA.PAS)**

OLEH
MOCHAMAD ROMADHONI ANSHORI
C100120209

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 05 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- 1. Dr. Rizka S. Ag., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
- 3. Syaifudin Zuhdi MHI., MHI.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

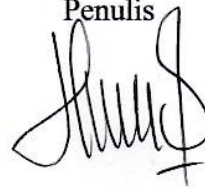
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 September 2020

Penulis



MOCHAMAD ROMADHONI ANSHORI
C100120209

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI
OLEH ISTRI PERTAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PASURUAN NO.1284/PDT.G/2015/PA.PAS)**

Abstrak

Penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya, bertujuan sebagai berikut: a) Untuk mengetahui konsep hukum islam dan hukum positif di indonesia mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya; b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya; c) Untuk mengetahui penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif . Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Konsep hukum Islam dan positif mengenai pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalil yang digunakan Fatwa MUI terkait dengan pengangkatan anak diantaranya adalah: a) Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4, Surat Al-Ahzab ayat 5, Al-Ahzab ayat 40; b) Sabda Nabi Muhammad SAW. Pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dimana Pengadilan Negeri telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 28 Nopember Pemohon tidak sungguh-sungguh akan Permohonannya tersebut. Hakim dalam penetapannya menyatakan; a) Menyatakan permohonan Pemohon Gugur; b) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dimana hakim menggunakan hak ex officio untuk menolak. Dalam kamus hukum ex officio berarti karena jabatan. Dimana hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi pengugat maupun tergugat.

Kata kunci: anak angkat, dasar, proses hukum pengangkatan anak

Abstract

Research on the review of Islamic law on adoption of children whose parents are not known, aims as follows: a) To find out the concepts of Islamic law and positive law in Indonesia regarding adoption of children whose parents do not know; b) To find out the judge's considerations in deciding the appointment status of children whose parents do not know; c) To find out the solution to the problem of adoption of children whose parents do not know. The method used in this research is the normative method. This type of research is descriptive. The research results obtained that the concept of Islamic law and positive regarding the arrangement of adoption of children is regulated in Article 1 paragraph (1) Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the implementation of adoption of children. The evidence used by the MUI Fatwa regarding the adoption

of children includes: a) Al-Quran Surat Al-Ahzab verse 4, Surat Al-Ahzab verse 5, Al-Ahzab verse 40; b) The words of the Prophet Muhammad. Judge's consideration in deciding the appointment status of a child whose parents do not know where the District Court has read the petition letter of the applicant dated November 28, the Petitioner is not serious about the Petition. The judge in his determination stated; a) Declare the petition of the Applicant to Fall; b) Imposes the petitioner to pay the court fee incurred in this case amounting to Rp. 161,000 (one hundred and sixty one thousand rupiah). Settlement of problems regarding adoption of unknown parents whose judge uses ex officio's right to refuse. In ex officio legal dictionary means because of the position.

Keywords: adopted children, basic, appointment of child legal process

1. PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan anak memiliki bagian terpenting sebab anak merupakan simbol kebahagiaan daripada pernikahan dan juga sebagai penerus keluarga (Cynthia, 2017).

Anak adalah karunia dan anugerah terindah daripada Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka yang melakukan pernikahan (suami istri). Anak merupakan amanah daripada Allah yang diberikan kepada setiap orang tua dalam pernikahan. Sehingga kehadiran anak merupakan alasan setiap orang untuk mengikatkan diri dalam pernikahan. Namun, realita yang terjadi bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan kehendak manusia, sebab terdapat pasangan suami istri sudah menjalani pernikahan dalam waktu yang relatif lama belum juga dikaruniakan seorang anak.

Sistem hukum Indonesia mengatur tentang pengangkatan anak dimana sangat prularis dengan melihat beberapa keyakinan yang diakui oleh negara, hal ini karena kondisi masyarakat yang sangat pluralistik. Pada sistem hukum Indonesia pengangkatan anak memiliki landasan hukum diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129

serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pandika, 2012).

Pengangkatan anak secara bahasa Inggris adalah *adoptie* atau *adoption* yang berarti mengangkat anak atau pengangkatan anak (Mertosedono, 1990). Dalam bahasa Arab pengangkatan anak disebut dengan *tabanni* yang berarti *ittkhadzuhu ibnam* yaitu mengambil anak (Farid dan Rosmawati, 2012). Persoalan mengenai pengangkatan anak bukanlah merupakan masalah yang baru di Indonesia, sebab sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan berbagai faktor yang berbeda satu sama lain berdasarkan sistem hukum yang berkembang (Muderis, 1995).

Islam melalui Rasulullah sebelum masa kenabiannya sudah melakukan pengangkatan anak bernama Zain Bin Harits dan memanggilnya dengan nama Zaid Muhammad, akan tetapi Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dikarenakan mengganti nama Zain Bin Harits dengan Zain Muhammad pada Surah Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 dimana inti surah tersebut adalah pemberian nama kepada anak angkat disesuaikan dengan kebiasaan bangsa arab pada waktu itu (Budiarto, 1995).

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Budiarto, 1991);

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Berdasarkan penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt pemohon merupakan suami istri yang beragama Islam dengan dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Alasan pemohon melakukan pengangkatan anak dikarenakan selama menikah pemohon belum dikaruniakan seorang anak, oleh karena itu pemohon melakukan adopsi atau pengangkatan anak yang diperoleh dari Pelayanan Sosial Auhau Balita. Dalam penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt hakim memutuskan bahwa pemohon diberikan keabsahan secara hukum melakukan pengangkatan anak akan tetapi tidak diterangkan dalam pengangkatan tersebut mengenai tanggung jawab dan hak yang harus diberikan pemohon kepada anak.

Proses pengangkatannya pun antara orang tua kandung dan anak angkat di desa Terantang hanya berpegang kepada saling percaya tanpa ada mengikuti proses hukum yang berlaku seperti harus didasarkan kepada putusan pengadilan dan akte notaris (Mutasir, 2017). Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, mengangkat anak merupakan salah satu solusi jalan keluar yang mereka gunakan. dikalangan masyarakat Indonesia mengangkat anak bertujuan untuk meneruskan keturunan

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik melakukan status anak angkat dalam pandangan hukum Islam hak dan kewajiban yang dibebankan padanya, peraturan hukum positif yang mengatur tentang pengangkatan anak serta proses yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ini maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya”.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya, penulis akan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana konsep hukum islam dan hukum positif di indonesia mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?; b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?; c) Bagaimana penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya? Penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap

pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya, bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui konsep hukum islam dan hukum positif di indonesia mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya;
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya;
- c) Untuk mengetahui penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri) (Muhammad, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Mengenai Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatan anak atau adopsi anak akan membahas mengenai adoptan, adoptandus, perbuatan hukum dan status anak angkat menjadi anak kandung yang didasari pada Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang terbagi menjadi: a) Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI); b)

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orangtua angkat Warga Negara Indonesia (WNI); c) Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orangtua Warga Negara Asing (WNA).

Pelaksanaan pengangkatan anak selanjutnya diatur di dalam keputusan Menteri Sosialis Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dimana didalam lampirannya diatur mengenai syarat-syarat adoptan sebagai berikut: a) Berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimal 45 tahun; b) Selisih umur antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun; c) Pada saat mengajukan permohonan Pengangkatan anak sekurangkurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut: 1). Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau 2). Belum mempunyai anak, atau 3). Mempunyai anak kandung seorang, atau 4). Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung; d) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat; e) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia; f) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah; g) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Persyaratan mengenai adoptan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal 13 disebutkan bahwa calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Sehat jasmani dan rohani; b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun; c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat; d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun; f) Tidak merupakan pasangan sejenis; g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak; j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak; k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Tarjih muhammadiyah dalam menghadapi kasus tentang anak angkat/adopsi berpegang pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Al-Ahzab ayat 4-5 dijelaskan:

“... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan)

Ayat al-Qur'an di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh didaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Berdasarkan keterangan diatas jelas bahwa anak angkat tidak boleh disamakan kedudukannya dengan anak kandung, baik dalam hal warisan maupun nasabnya, antara anak angkat dan orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi.

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang Adopsi. Dalam fatwanya, ulama NU menjawab persoalan tersebut dengan dua jawaban yaitu; Kalau dalam adopsi itu rerdapat penisbatan anak pada bapak angkatnya (ada pengakuan sebagai anak kandung .red), maka hukumnya haram. Kalau dalam pengangkatan anak itu hanya atas dasar memuliakan atau kasih sayang, maka hukumnya boleh. Pengangkatan seperti ini tidak termasuk tabanny(adopsi) yang diharamkan.

Sebagai dasar hukumnya, ulama NU mengutip hadis Nabi SAW. “Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunah” (HR. Muslim, no. 3314 dan 3373).

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Status Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya

Hakim menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Pemohon tidak sungguh-sungguh akan Permohonannya tersebut. Pemohon tidak sungguh-sungguh akan Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur; Menimbang bahwa Permohonan Pemohon gugur, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan perkara.

Hakim dalam penetapannya menyatakan; a) Menyatakan permohonan Pemohon Gugur; b) Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Adopsi anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 November 2013 terdaftar di bawah Nomor: 258/Pdt.P/2015/PN.GS tidak sesuai dengan Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Jika ditinjau dari hukum Islam maka sangat tidak relevan yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut: Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Adopsi anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 November 2013 terdaftar di bawah Nomor: 258/Pdt.P/2015/PN.GS tidak menjelaskan secara rinci asal-muasal anak tersebut, maka berdasarkan norma yang berlaku hakim sudah benar dalam menolaj permohonan dari Pemohon.

3.3 Penyelesaian Masalah Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya

Penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya yaitu penerapan kode etik dan perilaku hakim, peran hakim adalah: Memiliki dan mampu menempatkan sikap tegas dan independen dalam memutuskan suatu perkara, terbebas dari intervensi pihak manapun. Mampu menggali dan memahami nilai-nilai kehidupan masyarakat, agar putusannya menghasilkan keadilan substantif. Memiliki sikap tegas berani mengambil resiko dari putusannya, independen, dan memperlakukan secara sama. Mampu mewujudkan perilaku yang mencerminkan keteladanan. Melalui putusannya mampu menjadi penerang, petunjuk tentang masalah-masalah hukum bagi para pihak. Dalam menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan disiplin yang tinggi tanpa pamrih, sebagai pengabdian tertinggi abdi Negara. Setiap putusannya menunjukkan kualitas dan profesionalitas yang tinggi, menunjukkan luasnya wawasan hukum yang dimiliki.

Penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dimana hakim menggunakan hak *ex officio* untuk menolak. Dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan (Sudarsono, 1992). Dimana hakim boleh memutuskan suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat. Selanjutnya menurut Zainul Bahri pengertian *ex officio* yakni karena jabatan, tanpa memerlukan pengangkatan atau penetapan lagi untuk tugas yang baru tersebut (Bahri, 1996). Jadi pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya. Dan salahsatunya ialah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

Kesimpulan daripada penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dimana hakim menggunakan hak *ex officio* untuk menolak. Dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan (Sudarsono, 1992). Dimana hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat. Selanjutnya menurut Zainul Bahri pengertian *ex officio* yakni karena jabatan, tanpa memerlukan pengangkatan atau penetapan lagi untuk tugas yang baru tersebut (Bahri, 1996). Jadi pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya. Dan salahsatunya ialah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konsep hukum Islam dan positif mengenai pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h, Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Dalil yang digunakan Fatwa MUI terkait dengan pengangkatan anak diantaranya adalah: a) Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4, Surat Al-Ahzab ayat 5, Al-Ahzab ayat 40; b) Sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Imam Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajib lah ia mendapat kutukan Allah, malaikat-malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya *tasarruf* dan kesaksiannya."

Pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dimana Pengadilan Negeri telah membaca surat

permohonan pemohon tertanggal 28 Nopember ang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 November 2013 terdaftar di bawah Nomor: 258/Pdt.P/2015/PN.GS, Hakim menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang ah untuk itu, maka Pemohon tidak sungguh-sungguh akan Permohonannya rsebut. Hakim dalam penetapannya menyatakan; a) Menyatakan permohonan Pemohon Gugur; b) Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dimana hakim menggunakan hak *ex officio* untuk menolak. Dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan. Dimana hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat.Selanjutnya menurut Zainul Bahri pengertian *ex officio* yakni karena jabatan, tanpa memerlukan pengangkatan atau penetapan lagi untuk tugas yang baru tersebut. Jadi pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya. Dan salahsatunya ialah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

4.2 Saran

Untuk Hakim Pengadilan Agama, diharapkan kedepannya melihat secara detail mengenai kompetensi relatif daripada pemohon sehingga sebelum masuk pada pemeriksaan pokok permohonan hakim maupun pengadilan Agama dapat mengambil keputusan bahwa permohonan pemohon diterima atau tidak.

Untuk calon orang tua angkat, sebelum meminta legalitas kepada pengadilan Agama diharapkan melakukan evaluasi terhadap tanggungjawab dan finansial untuk anak angkat sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah kepada anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Farid dan Rosmawati. (2012). *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW, Al-Risalah*, Volume 12, Nomor 2 November 2012

- Bahri, Zainul. (1996). *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: Angkasa
- Budiarto, M., (1991). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Budiarto, M.. (1995). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Cynthia, Cindy, *et.all.* (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah. *Diponegogro Law Journal, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017*
- Mertosedono, Amir. (1990). *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Effthar Offset dan Dahara Prize .
- Muderis, Zaini. (1995). *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, Hasan. (2003). *Teknik Sampling*. Bandung: Alfabeta.
- Mutasir. (2017). Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam, Edisi Desember 2017 Vol. 41 No. 2 /173*
- Pandika, Rusli. (2012). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.